

**AKSELERASI REFORMA AGRARIA MELALUI  
KOORDINASI FUNGSI ANTARA KEMENTERIAN  
KOORDINATOR PEREKONOMIAN DAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SKRIPSI**

*Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

## ABSTRAK

**Debby Marcho Wijaya. Skripsi S1. Akselerasi Reforma Agraria melalui Koordinasi Fungsi antara Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, xiv + 133 Hal, 28 Buku, 6 Peraturan Perundang-undangan, 7 Jurnal, 12 Laporan, 3 Artikel Internet.**

Diterbitkannya Permenko No. 73 Tahun 2017 Tentang Tim Reforma Agraria merupakan implikasi dari banyaknya kementerian yang terlibat dalam program reforma agraria. Kondisi ini linier dengan permasalahan kelembagaan yang terjadi, yaitu egosektoral diantara masing-masing kementerian yang terlibat. Indikasinya adalah stagnasi pencapaian serta tumpang-tindih regulasi yang mengatur perihal agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dijalankan setelah adanya Permenko No. 73 Tahun 2017, serta faktor lain yang menjadi penghambat dalam proses koordinasi dilaksanakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini mendapati hasil bahwa, berdasarkan teori, koordinasi yang dilakukan masih belum efektif, seperti komunikasi yang dilakukan tidak intensif, previlage lembaga yang membuat adanya sekat pembatas dengan lembaga lainnya, serta konsep dan operasionalisasi program yang dijalankan jauh dari urgensi utama reforma agraria. Faktor lain yang mendukung permasalahan kelembagaan adalah soal transparansi data dan paradigma otonomi daerah yang mensyaratkan partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa masih banyak permasalahan kelembagaan, khususnya koordinasi yang harus dilakukan mengingat keterlibatan multi-lembaga dalam urusan agraria, karena bagaimanapun perihal koordinasi menjadi produsen salah satu penyebab stagnasi dalam pencapaian program reforma agraria.

***Kata Kunci: Koordinasi, Reforma Agraria, Permenko No. 73 Tahun 2017***

## **ABSTRACT**

**Debby Marcho Wijaya. S1 Thesis. Acceleration of Agrarian Reform through Function Coordination between the Coordinating Ministry for Economic Affairs and the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, xiv + 133 Things, 20 Books, 6 Legislations, 7 Journals, 12 Reports, 3 Internet Articles.**

Issuance of Permenko No. 73 of 2017 concerning the Agrarian Reform Team is the implication of various ministries involved in the agrarian reform program. This condition is linear with the conflict that occurs, namely the egosectoral between each ministry involved. The indication is agreed stagnation and agreed overlap regarding agrarian matters. This study discusses to discuss how implemented by Permenko No. 73 of 2017, as well as other factors that become obstacles in the coordination process implemented. The method used is qualitative. This research found results, based on the theory, the relations carried out were still ineffective, such as communication that was not intensive, prevented institutions from making boundaries with other institutions, and the concept and operationalization of programs carried out far from the urgency of agrarian reform. Another factor that supports safety issues is agreed data and the paradigm of regional autonomy which requires active participation from local governments. This research came to a conclusion that still discussed a lot about treatment, a special discussion that must be done by considering multi-institutions in agrarian affairs, which had never been done before, was one of the causes of stagnation in the planning of the agrarian reform program.

**Keywords:** *Coordination, Agrarian Reform, Permenko No. 73 of 2017*

